

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Y., & Adang. (2016). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chandra, U. S. (2017). *Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jurnal Komunikasi, 3(1).
- Departemen Pendidikan Nasional. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- LBH Yogyakarta. (2017). *Rezim Represi: Pelanggaran Hak Asasi Menjadi-jadi*. Yogyakarta: Best Line Press.
- Ridwan, M., & Ediwarman. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Sahetapy, J. E. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). *Kriminologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Situmeang, S. M. (2020). *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia.

Surakhmad, W. (1982). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Tribowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Yuhana, A. (2009). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan 1 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR*. Bandung: Fokusmedia.

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Sumber Lainnya :

Kartika Sari, D., & Siahainenina, R. R. (2015). *Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1. Diakses : <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/446/484>

- Rahmanto, T. Y. (2016). *Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 7(1). Diakses: <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/70/17>
- Syahnana, R. M. (2013). *Penerapan Prosedur Tetap Polri dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki*. Legal Opinion, 2(1). Diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/84309/44129/>
- Syamsir. (2015). *Demokratisasi Hak Berpikir dan Berkreasi Warga Negara di Indonesia*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 115–133. Diakses: <https://media.neliti.com/media/publications/43251-ID-demokratisasi-hak-berpikir-dan-berkreasi-warga-negara-di-indonesia.pdf>
- Suharko. (2006). *Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 10.
- Fragusty, W. (t.t.). *Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis yang Berdampak pada Kerusakan Fasilitas Umum* (Skripsi). Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/1446/1/SKRIPSI%20WISNU%20FRAGUSTY.pdf>